

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Dela Alfani¹, Juliana Nasution²

^{1,2} Akuntansi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fanidf97@gmail.com¹, julianansution@uinsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi (SPID) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini mengumpulkan data yang objektif melalui penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Objek penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, subjek penelitian ini adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hasil dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini SIPD merupakan sistem berbasis online yang memberikan kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Dari segi waktu, SIPD yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut menghasilkan informasi data yang lebih baik dan cepat. DPA dan RKA juga merupakan output yang dihasilkan dalam sistem SIPD ini. Berdasarkan analisis melalui poin-poin kualitas yang termasuk kategori yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, ditemukan bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Jelas bahwa pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat, meskipun 60-70% pengguna sistem masih belum memahami input dengan jelas, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih.

Kata kunci: SIPD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara

Abstract

This study aims to determine how the implementation of information systems (SPID) in the industry and trade department of North Sumatra province. This research uses qualitative research methods, because this research is collecting objective data through research. Data collection techniques in this study is by means of interviews, observations and documentation. The data analysis technique in this research is by collecting data, presenting data and drawing conclusions. The object of this research is the Department of Industry and Trade of North Sumatra Province, the subject of this research is the local government information system (SIPD). The results of this study are in this research SIPD is an online-based system that provides convenience in the preparation of the planning and budgeting process. In terms of time, the SIPD implemented by the North Sumatra Industry and Trade Office creates better and faster data information. DPA and RKA are also outputs produced in this SIPD system. Based on the analysis through quality points which include categories that are understandable, relevant, reliable, and comparable, it is found that the implementation of SIPD has been effective. It is clear that employees at the North Sumatra Department of Industry and Trade find work easier and faster, even though 60-70% of users of the system still do not understand the input clearly, thus requiring more supervision.

Keywords: SIPD, North Sumatra Department of Industry and Trade

PENDAHULUAN

Meningkatkan program pembangunan di segala bidang sebagai sarana menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan (Bekti, 2015) Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri NO. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan seluruh SKPD Kota Medan termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Tugas Pemerintahan daerah Mengajukan rancangan Perda, Menetapkan Perda yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD, Mengajukan Rancangan Perda tentang APBD terhadap DPRD. Membahas rancangan Perda tentang APBD Bersama DPRD Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, Mewakili daerahnya diluar atau didalam Asas Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Medan Merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. (Djoko, 2010)

Dalam rangka melakukan pertanggungjawaban proses Perencanaan serta Anggaran, penggunaan teknologi adalah kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Percepatan penerapan SIPD diharapkan agar Pemerintah Daerah segera menyatukan seluruh sistem dengan data pembangunan wilayah serta data keuangan wilayah ke SIPD. Hal ini merupakan porsi penting dalam mengambil alih kendali guna mencapai tujuan yang telah diharapkan (Ekaputra, 2021). Dijelaskan juga dalam UU tersebut, data yang harus disediakan tidak hanya berupa Data Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun juga bisa menata data pemerintahan yang lain. Dalam menindaklanjuti terselenggaranya proses Perencanaan serta Anggaran, pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan serta menggunakan perkembangan teknologi data guna bisa melaksanakan serta menyalurkan data Perencanaan serta Anggaran secara transparansi terhadap masyarakat.

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi pemerintahan lainnya bagi pengambilan keputusan baik di daerah maupun di pusat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah serta dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat.



Gambar 1. System Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi

Sistem Informasi Kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen adalah pengertian dari Sistem Informasi. Istilah sistem informasi dalam arti luas sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (garbage). Sistem informasi menurut Gordon B. Davis (1991:91) adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Nataniel & Hatta, 2009). Sementara itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (Djoko, 2010)

Sistem Informasi Pemereintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dirancang oleh Kemendagri sebagai tujuan guna membenarkan alur tahapan penataan dokumen rencana daerah yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan. BPKP sebagai selaku pengemban amanat pembina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah sesuai PP No 60 tahun 2008 dalam meningkatkan SIPD mengacu pada syarat perundang-undangan serta aplikasi pengelolaan Perencanaan serta Anggaran bersumber pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mempraktikkan Sistem Data Pemerintahan Daerah (SIPD) semenjak tahun 2020 yang tadinya memakai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Penerapan SIPD ini sangat diharapkan untuk memperbaiki birokrasi yang semakin maju (Jogiyanto., 2010)

Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Good Governance salah satunya adalah menyangkut “transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; wajib melakukan keterbukaan informasi” (Remaja, 2017: 39). Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional seperti yang

terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Selain itu, adanya tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta keterbukaan informasi publik membuat Pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini. Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis SPBE terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Informasi Pembangunan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:
 - a. Perencanaan Anggaran Daerah
 - b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang bukan bersifat eksperimen atau percobaan di laboratorium dan dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang berkualitas dengan penelitian di lapangan. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis berarti data-data yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Deskripsi merupakan permasalahan-masalah yang ada. (Suwardi, 2013). Teknik pengumpulan datanya adalah dengan triangulasi (gabungan), analisis informasi yang bertabiat kualitatif, wawancara, serta hasil dari riset ini lebih ditekankan sebuah arti ketimbang generalisasi. Saat tidaknya suatu data itu berdasarkan teknik triangulasi, berupa data, metode maupun sumber di mana data tersebut didapatkan (Chasanah et al., 2017). Studi kasus juga digunakan peneliti dalam melakukan penelitian (Aneta, 2010). Hal ini dikarenakan, peneliti juga melihat bagaimana kasus yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam buku Moleong, bagi Bogdan serta Tylor melaporkan kalau riset kualitatif ialah informasi deskriptif yang didapat dari hasil data tertulis serta bisa dilihat dan dikaji oleh periset selaku bahan kasus yang hendak diteliti (Lexy J. Moleong, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah juga mencanangkan bahwa sistem komputerisasi yakni SIPD sangat membantu proses anggaran serta perencanaan pemerintah daerah, walaupun pada awalnya penerapan ini berkesan sulit. Melihat hasil analisis riset di lapangan, pegawai yang berperan dalam pengoperasian SIPD di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat 60% belum memahami terhadap pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Perihal ini teruji berdasarkan wawancara dari pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, antara lain RH selaku Kepala Bidang Program dan Pelaporan yang bertugas dalam pengoperasian SIPD yang mengatakan “SIPD merupakan suatu tools (perlengkapan) ataupun sistem perencanaan terkini yang didesain oleh Kemendagri. Terdapatnya SIPD membuat pengolahan Perencanaan serta Penganggaran Daerah dirasa semakin efektif sehingga tidak membutuhkan penambahan Standar Harga Barang (SHB), kita tinggal klik-klik saja kodenya, kita tinggal menginput setelahnya secara otomatis sistem yang akan berkerja. Ini juga diharap supaya adanya keterbukaan data, keterbukaan informasi tentang perencanaan daerah”. RH juga mengeluhkan “Di instansi ini sendiri sebelum dilakukan penerapan, terlebih dahulu tidak dicoba kajian ataupun diklat khusus dengan kami selaku pengguna sistem, tetapi pemerintah hanya sekedar melaksanakan sosialisasi. Cuma saja kan kita dikasih rentang waktu penginputan dan mekanisme penginputan secara online. Sebenarnya, disinilah lelahnya kita. Sebab, kita sendiri 60% belum siap buat menggunakan aplikasi berbasis online. Dikarenakan, seluruh step by step nya online. Jadi, kita menginput lewat website khusus yang telah diberikan alamatnya, baru kita melakukan serangkaian proses penginputan, pengesahan, ngeprint serta seluruh macamnya”. RH juga mengatakan: “Proses pembuatan DPA serta RKA semenjak diterapkan SIPD semakin mudah dan sangat terbantu walaupun pengawasan lebih sangat diperlukan dalam penginputan”. Di mana di dalam pengelolaan SIPD dalam proses perencanaan serta anggaran, pemerintah merancang khusus sebuah sistem guna mempermudah pekerjaan setiap instansi dalam menginput perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan hasil riset inilah, peneliti menyimpulkan sebenarnya pegawai sangat terbantu dan mempermudah pekerjaan dalam menggunakan sistem ini. Hanya saja, di instansi tersebut dalam prosesnya masih tidak memahami penggunaannya secara menyeluruh. Hal ini diakibatkan pemerintah hanya sekedar melakukan sosialisasi tapi tidak dengan melakukan pelatihan khusus kepada setiap instansi. Sehingga saat penginputan dilakukan, pegawai yang terkait dalam proses SIPD ini masih butuh bantuan pihak lain. Untuk hal ini dalam penerapannya dapat disimpulkan jika untuk penerapan SIPD sudah efektif dalam pelaksanaan proses perencanaan serta penganggaran. Hanya saja, pemahaman dalam menggunakan SIPD masih kurang sehingga membutuhkan pengawasan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) maka peneliti menggunakan fokus penelitian sesuai teori penerapan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu:

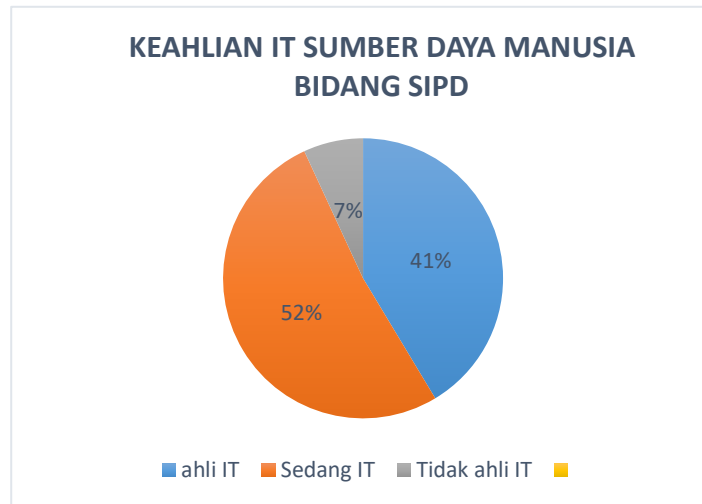
1. Tujuan Kebijakan

Dalam pengimplementasian menunjukan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan aplikasi berbasis web ini untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah Sumatera Utara. Namun, karena sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini merupakan aplikasi yang masih baru, proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak kendala yang di dapatkan. Tapi dengan berjalannya waktu, berbagai kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam sistem ini pasti akan diperbaiki dan akan terus di upgrade agar berbagai harapan yang mendasari dibentuknya aplikasi ini akan terpenuhi.

2. SDM

Kemajuan suatu program salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, dalam hasil penelitian yang dilakukan dengan Badan pengelola keuangan dan asset daerah kota

medan mendapatkan hasil bahwa sumber daya manusia telah memenuhi dan sudah sesuai dengan tupoksinya dilihat dari lapangan kebanyakan yang mengoperasikan sistem informasi pemerintahan daerah adalah yang berusia muda yang mempunyai potensi dan kemampuan dalam pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah, namun Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara harus lebih siap disaat terjadi pergantian kepemimpinan agar pada saat waktu penginputan data sudah dapat di input sehingga tidak terjadi keterlambatan, adapun dalam hal sumber daya sarana dan prasarana telah tersedia baik jaringan wifi, komputer dan alat penunjang lainnya sehingga badan pengelola keuangan dan asset daerah kota medan tidak kuatir lagi dalam penginputan data meskipun masih banyak kekurangan di dalam sisten informasi berbasis web in



Gambar 2. Keahlian IT Sumber Daya Manusia Bidang SIPD

3. Karakteristik Tim Pelaksana

Untuk menjalankan suatu program kegiatan maka kerjasama sangat diperlukan dalam mewujudkannya koordinasi yang jelas dan teratur pula penunjang dalam keberhasilan suatu program kegiatan, pemerintah Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai penanggung jawab dalam proses implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dimana orang yang terlibat didalamnya mempunyai tugas untuk mewujudkan pembangunan agar kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah agar terintegrasi dengan baik.

Pengimplemmtasian dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah berjalan dengan lumayan signifikan dengan berbagai teori dan kemampuan dalam pengoperasian system keuangan yang di diupdate di aplikasi tersebut, dengan berbagai sumber daya manusia yang memadai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara. Dengan kemajuan penggunaan SIPD tersebut pemerintahan daerah Sumatera Utaramenyediakan fasilitas yaitu Komputer sebagai sarana dan prasarana penunjang terlaksana nya penginputan keuangan dengan baik di Dinas Perindustriuan dan Perdagangan Sumatera Utara. Namun dengan berjalannya penggunaan system ini tidak semudah yang dibayangkan, masih saja ada kekurangan dalam pengimplementasiannya, seperti keterlambatan saat penginputan data ke system aplikasinya, makadari itu sumber daya manusia yang kompeten.

SIMPULAN

Bersumber dari hasil riset yang telah peneliti lakukan, terkait fenomena yang terjadi telah penulis jabarkan di bagian pembahasan. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dalam riset ini adalah SIPD merupakan suatu sistem berbasis online yang memberi kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Dilihat dari segi waktu SIPD yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat. DPA dan RKA juga merupakan output yang dihasilkan dalam sistem SIPD ini. Berdasarkan analisa melalui poin mutu yang meliputi kategori dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan diperoleh bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Ini terlihat jelas bahwa pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat walaupun 60-70% pengguna sistem tersebut masih belum memahami jelas penginputannya, sehingga membutuhkan pengawasan lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2013). Pengaruh Kejelasan Anggaran Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Laporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Kabupaten dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis Yogyakarta, 02*.
- Alexander FK, S. (2013). *Web Programing Power Page*. Yogyakarta: Mediakom.
- Arikunto. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basar, N. F. (2018). Akuntansi Pertanggungjawaban Biaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maros. *Jurnal Economix, Volume 6(Nomor1)*.
- Bekti, B. h. (2015). *Mahir Membuat Website dengan Adobe Dream Weafer CS6,CSS dan Jiqueri*. Yogyakarta: Andi.
- Chariri, G. d. (2010). *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Daniri, A. (2012). *Good Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Djoko, S. (2010). Corporate overnance Karakteristik Perusahaan. 6 , 39-69.
- Dwi, M. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. .
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendryani, R. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Bisnis dan Ekonomi, vol.22(1)*.
- Hery. (2011). *Teorio Akuntansi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Perdana Press.
- Jogiyanto. (2010). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Bandung: Salemba Empat.
- Khasanah, N. L. (2015). Pengaruh Karakteristik Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Dionegoro Of Accounting, Vol.3(3)*.
- Kotler. (2011). *Prrinsip-Prinsip Managemen*. jakarta: erlangga.
- Mardiasmo. (2013). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Meliza, W. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Peningkatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Eksplorasi Akuntansi, vol 1(3)*.
- Pratama, K. A. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah daerah, Kekayaan Daerah belanja daerah terhadap pelaporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi, Vol. 3(1)*.
- Rahmadi, M. (2013). *Tips Membuat Website tanpa Coding dan Langsung*. Yogyakarta: Andi.

- Rukmana, D. (2011). *Metode Analisis Kualitatif*. Bandung: Pustaka Utama.
- Sawir, A. (2010). *Analisa Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Se Tin, T. H. (2012). Analisis Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajer Pusat Laba di warung Paskal Bandung. *Jurnal Akuntansi, Vol 4*(No 2).
- Setiawan, T. (2010). *Mahir Akuntansi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukhemi. (2016). Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. 8, 84-95.
- Suriadi, P. T. (2018). Pengaruh Kekayaan Daerah, Totak Aset, Jumlah Penduduk, Tingkat Ketergantungan, dan temuan Audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekobis Dewantara, 1*(1), 12-20.
- Suwardi. (2013). *Angkutan Umum*. Surakarta.: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yogi Setiyo Langgeng, E. D. (2014). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 3*(Nomor 6).